

BAB II

GAMBARAN UMUM

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

2.1 Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Undang - Undang Nomor. 22 Tahun 1999 diperbaharui dengan Undang – Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 25 Tahun 1999 diperbaharui dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat – Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka dibentuklah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang atau lebih dikenal DPKAD Kota Semarang, yang merupakan organisasi baru hasil penggabungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Semarang (Dipenda) dengan Bagian Keuangan Setda Kota Semarang.

Aturan yang mendasari pembentukan organisasi tersebut adalah Perda No. 2 Tahun 2001 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kota Semarang yang ditindaklanjuti dengan aturan pelaksanaan yang berupa Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 061.1/188/2001 tanggal 25 April 2001. Peraturan Walikota Semarang Nomor : 42 Tahun. 2008 Tanggal 24 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang. Namun perkembangan waktu dan berubahnya peraturan – peraturan baru tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menuntut DPKAD Kota Semarang untuk eksis dalam menjalankan misinya untuk menjadi motor dalam pengelolaan keuangan daerah yang profesional dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan terlaksananya tertib administrasi pengelolaan aset daerah sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil dan rasional.

Dinas Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah Kota Semarang memiliki peranan ganda, yaitu sebagai SKPD dan PPKD. Sebagai SKPD

peranan DPKAD mengelola belanja gaji PNS, belanja rutin SKPD, belanja kegiatan SKPD beserta pengelolaan Aset Kota Semarang dan mengelola pendapatan Asli daerah Kota Semarang . DPKAD selaku PPKD berperan mengelola Pendapatan, Perimbangan, dan Penerimaan lain - lain Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah. Serta DPKAD bertindak dalam Kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

Dengan adanya regulasi hukum dari pusat ke daerah yang bersifat Pengelolaan Keuangan Daerah, maka DPKAD turut menyusun Peraturan Walikota Pengelolaan Keuangan sesuai dengan tupoksi DPKAD.

Pada awal tahun 2017 terbentuklah Badan Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah atau BAPENDA memiliki kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Semarang No. 89 Tahun 2016. BAPENDA khusus untuk melayani PBB memiliki unit pelayanan sendiri yang berbeda tempat yang terdiri dari 4 (empat) unit kerja yaitu Pos Pelayanan PBB Wilayah I sampai dengan Pos Pelayanan PBB Wilayah IV yang memiliki lokasi berbeda. Pos Pelayanan PBB ini dibentuk sejak tahun 2012 yang regulasi nya tetap dibawah naungan Badan Pendapatan Daerah hanya saja yang membedakan adalah lokasinya.

2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

2.2.1 Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera.

2.2.2 Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Pendapatan Daerah memiliki misi antara lain sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas.
- b. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik.

- c. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan.
- d. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif.

2.3 Lokasi dan Wilayah Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Pelaksanaan pengamatan dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang dan unit kerja Pos Pelayanan PBB Wilayah I Kota Semarang. Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang beralamat di Jalan Pemuda No. 148 Semarang, sedangkan untuk Pos Pelayanan PBB Wilayah I beralamat di Jalan Kanguru Raya No. 3 Semarang.

Wilayah kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dalam hal ini pada bagian bidang Pajak I yaitu Pajak Bumi dan Bangunan, memiliki empat wilayah kerja yang lokasinya berbeda-beda dan bertanggung jawab atas beberapa kelurahan untuk kegiatan pembayaran dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Wilayah kerja tersebut meliputi:

Tabel 2.1
Wilayah Kerja Pos Pelayanan PBB Wilayah I
Kota Semarang

Alamat : Jalan Kanguru Raya No. 3 Semarang		
No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan
1	Gayamsari	7
2	Pedurungan	12
3	Semarang Timur	10
4	Genuk	13

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (2017)

Tabel 2.2
Wilayah Kerja Pos Pelayanan PBB Wilayah II
Kota Semarang

Alamat : Jalan Ade Irma Suryani No. 24 Semarang		
No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan
1	Semarang Tengah	15
2	Semarang Utara	8
3	Semarang Selatan	10
4	Gajahmungkur	8

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (2017)

Tabel 2.3
Wilayah Kerja Pos Pelayanan PBB Wilayah III
Kota Semarang

Alamat : Jalan Ronggolawe Selatan No. 4 Semarang		
No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan
1	Semarang Barat	16
2	Ngaliyan	10
3	Tugu	7
4	Mijen	14

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (2017)

Tabel 2.4
Wilayah Kerja Pos Pelayanan PBB Wilayah IV
Kota Semarang

Alamat : Jalan Prof. Sudharto No. 116 Semarang		
No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan
1	Banyumanik	11
2	Tembalang	12
3	Gunungpati	16
4	Candisari	7

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (2017)

2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang memiliki tugas pokok “Membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah”.

Adapun untuk melaksanakan tugas pokok itu Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan Bidang pajak daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak, Bidang perbendaharaan, Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah.
2. Perumusan rencana strategis sesuai visi dan misi Walikota.
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan Bidang pajak daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak, Bidang perbendaharaan, Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah.
4. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya.
5. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai.
6. Penyelenggaraan kerjasama Bidang pajak daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak, Bidang perbendaharaan, Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah.
7. Penyelenggaraan kesekretariatan Bapenda.
8. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang pajak daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak, Bidang perbendaharaan, Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah.
9. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai.
10. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang pajak daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan

Daerah Bukan Pajak, Bidang perbendaharaan, Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah.

11. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan.

12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsi.

2.5 Kebijakan dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

2.5.1 Kebijakan

A. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah

- Peningkatan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dengan menerapkan sistem online.
- Peningkatan penggalangan sumber-sumber penerimaan diluar PAD.

B. Kebijakan Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Daerah adalah pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan mengembangkan software sistem pengelolaan APBD yang terintegrasi.

C. Kebijakan pengelolaan aset daerah adalah pengembangan pengelolaan aset yang profesional dengan mapping program dan sertifikasi aset Pemkot Semarang.

2.5.2 Kegiatan

1. Aspek Pendapatan, tugasnya meliputi :

- a. Perumusan perencanaan, penelitian, pelaksanaan, penagihan dan koordinasi pendapatan daerah.
- b. Penetapan dan pemungutan pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- c. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah.
- d. Pelaksanaan penyuluhan mengenai pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- e. Pemberian bantuan penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB dan surat tagihan pajak bumi dan bangunan (STT PBB).

2. Aspek Administrasi Keuangan Daerah, tugasnya meliputi :
 - a. Pelaksanaan perumusan, perencanaan, pelayanan administrasi pengendalian dan koordinasi belanja daerah;
 - b. Pengkajian kebutuhan daerah;
 - c. Pelaksanaan pelaksanaan teknis pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Pelaksanaan standard pelayanan publik (SPP) dibidang pendapatan dan belanja daerah.
 - e. Penyelenggaraan sistem informasi keuangan dan aset daerah.
3. Aspek Aset Daerah, tugasnya meliputi :
 - a. Penyusunan perumusan, perencanaan bidang aset daerah.
 - b. Pendataan, penginventarisasi, dan pencatatan aset.
 - c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset daerah.
 - d. Penyusunan *database* aset tanah dan bangunan milik pemerintah Kota Semarang.
 - e. Penyusunan laporan realisasi kinerja dibidang aset daerah.

2.6 Bagan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Kedudukan Badan Pendapatan Daerah sebagai pengelola keuangan dan aset daerah bertanggung jawab kepada Walikota Semarang. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.

Susunan organisasi dan tata kerja pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 89 Tahun 2016 tentang penjabaran tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3. Bidang Pajak Daerah I , terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah I
 - b. Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah I
 - c. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah I
- 4. Bidang Pajak Daerah II , terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah II
 - b. Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah II
 - c. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah II
- 5. Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Perimbangan
 - b. Sub Bidang Lain-lain PAD dan Lain-lain Pendapatan yang sah
 - c. Sub Bidang Penatausahaan Retribusi
- 6. BidangPembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah , terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
 - b. Sub Bidang Penyuluhan dan Pelayanan Pendapatan Daerah
 - c. Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional
 - A. Kepala Badan

Kepala badan mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pandapatan Daerah.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II,

Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak dan Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. Penyelesaian tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai;
- f. Pengkoordinasian sinkronisasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta evaluasi tugas-tugas- kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak, dan Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
- g. Pelaksanaan fasilitas tugas-tugas Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak, dan Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di subbagian perencanaan dan evaluasi, keuangan dan asset, umum dan kepegawaian;
- j. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Tahunan;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bapenda;
 1. Pelaksanaan kegiatan fasilitas Reformasi Birokrasi Bapenda;
 2. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bapenda;
 3. Menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;

4. Menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Bapenda;
5. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Bapenda;
6. Pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Bapenda;
7. Pelaksanaan tata kelola persuratan, kearsipan, keputakaan, dokumentasi, keprotokolan, dan kehumasan Bapenda;
8. Pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
9. Pelaksanaan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Bapenda;
10. Pelaksanaan kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
11. Pelaksanaan penatausahaan barang pakai habis dan barang inventaris;
12. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Bapenda;
13. Pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di Bapenda;
14. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
15. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
16. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan;
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

C. Bidang Pajak Daerah I

Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang pendaftaran dan pendataan, bidang

penetapan, serta bidang penagihan. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pajak Daerah I mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. Penyelesaian tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai;
- f. Pelaksanaan Koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- g. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pajak Daerah I;
- h. Pelaksanaan kegiatan Subbidang Pendaftaran dan pendataan Pajak Daerah I, Subbidang Penetapan Pajak Daerah I, Subbidang Penagihan Pajak Daerah I;
- i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pajak Daerah I;
- j. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pajak Daerah I;
- k. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawab;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- m. Pelaksanaan penyusutan laporan program dan kegiatan;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi;

D. Bidang Pajak Daerah II

Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang pendaftaran dan pendataan, bidang penetapan, serta bidang penagihan. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pajak Daerah II mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. Penyelesaian tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai;
- f. Pelaksanaan Koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- g. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di bidang Pajak Daerah II;
- h. Pelaksanaan kegiatan Subbidang Pendaftaran dan pendataan Pajak Daerah II, Subbidang Penetapan Pajak Daerah II, Subbidang Penagihan Pajak Daerah II;
- i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi bidang Pajak Daerah II;
- j. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di bidang Pajak Daerah II;
- k. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawab;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- m. Pelaksanaan penyusutan laporan program dan kegiatan;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi

E. Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak

Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasi, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Subbidang Perimbangan, subbidang lain-lain PAD dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, Subbidang Penatausahaan Retribusi. Untuk melaksanakan tugasnya bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;

- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. Penyelesaian tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai;
- f. Pelaksanaan Koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- g. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pendapatan Bukan Pajak;
- h. Pelaksanaan kegiatan Subbidang Perimbangan, Subbidang Lain-lain PAD dan pendapatan Yang sah, Subbidang Penatausahaan Retribusi;
- i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Pendapatan Daerah Bukan Pajak;
- j. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak;
- k. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawab;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- m. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi;

F. Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah

Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasi, membina, mengawasi serta mengendalikan serta mengevaluasi Subbidang Pembukuan dan Pelaporan, Subbidang Penyuluhan dan Pelayanan Pendapatan Daerah, dan Subbidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;

- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
 - c. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
 - d. Penyelesaian tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai;
 - f. Pelaksanaan Koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
 - g. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
 - h. Pelaksanaan kegiatan Subbidang Pembukuan dan Pelaporan, Subbidang Penyuluhan dan Pelayanan Pendapatan Daerah, dan Subbidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
 - i. Pelaksanaan kegiatan penyusuna data dan informasi di bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
 - j. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
 - k. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawab;
 - l. Pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Bapenda;
 - m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
 - n. Pelaksanaan penyusutan laporan program dan kegiatan;
 - o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi;
- G. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pandapatan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai Bagan Organisasi BAPENDA Kota Semarang disajikan dalam gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1
Bagan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang



